
AGENDA PENGEMBANGAN KAJIAN KEPEMUDAAN DI INDONESIA

Oki Rahadianto Sutopo

Peneliti Youth Studies Centre & Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
Email: oki.rahadianto@ugm.ac.id

Abstrak

This article offers some critical ideas to develop youth studies in Indonesia. Specifically, it focuses on theoretical and practical agendas relevant to the contemporary conditions of young people in Indonesia. Youth as a subject has an ambiguous position in the realm of contested knowledge production. Youth is considered as an important and crucial subject for the future of a nation. In contrast, youth as a subject is in a marginalized position not only in terms of knowledge production but also in terms of policy making. This condition is an early warning for social agents who are concern with youth issues to be committed militantly to the production of youth studies. Based on my critical reflection, empirical observations and relevant literature reviews, I offer theoretical and practical agenda to develop Indonesian youth studies. The theoretical agenda consists of bridging the gap between youth transition and youth culture, mainstreaming concept of social class and class inequality and developing youth studies based on Indonesian context. The practical agenda consists of mainstreaming strategic research and dissemination of knowledge production on youth studies equally. As a conclusion, it is my personal hope that some ideas in this article will be an entry point for more enlightened and emancipated young Indonesian generation in the future.

Keywords: Youth studies, theoretical agenda, practical agenda, Indonesia.

AGENDA TO DEVELOP YOUTH STUDIES IN INDONESIA

Abstrak

Artikel ini menawarkan ide-ide kritis untuk mengembangkan kajian kepemudaan di Indonesia. Secara spesifik, ide-ide ini difokuskan pada agenda teoritis dan praktis yang relevan dengan kondisi kontemporer pemuda di Indonesia. Pemuda sebagai subjek studi menempati posisi ambigu dalam konstelasi produksi pengetahuan. Pemuda dianggap penting dan krusial sebagai subjek bagi masa depan bangsa. Di sisi yang lain, pemuda sebagai subjek juga berada dalam posisi marjinal tidak hanya dalam konteks produksi pengetahuan namun juga dalam hal pembuatan kebijakan. Kondisi ini merupakan peringatan dini bagi agen-agen sosial yang peduli terhadap kajian kepemudaan di Indonesia. Berdasarkan refleksi kritis, observasi empiris dan studi terhadap literatur kajian kepemudaan yang relevan, saya menawarkan agenda teoritis dan praktis untuk mengembangkan kajian kepemudaan di Indonesia. Agenda teoritis tersebut antara lain: menjembatani antara pendekatan transisi pemuda dan buday pemuda, pengarusutamaan konsep kelas sosial dan kesenjangan sosial, dan pengembangan kajian kepemudaan berdasarkan konteks Indonesia. Sedangkan agenda praktis yang ditawarkan antara lain: pengarusutamaan riset strategis dan diseminasi kajian kepemudaan secara merata. Sebagai kesimpulan, harapan saya semoga ide-ide dalam artikel ini dapat menjadi titik masuk bagi terwujudnya generasi muda Indonesia yang lebih tercerahkan dan teremansipasi di masa depan.

Keywords: Youth studies, theoretical agenda, practical agenda, Indonesia.

PENDAHULUAN

Kajian kepemudaan (youth studies) di Indonesia masih merupakan subjek kajian yang relatif baru. Kondisi ini mengindikasikan perlunya inisiatif bersama dari para intelektual, akademisi, praktisi, aktivis maupun pembuat kebijakan untuk bersinergi mengembangkan kajian kepemudaan yang relevan dengan konteks Indonesia kontemporer. Produksi pengetahuan kepemudaan yang berkelanjutan diperlukan tidak hanya dalam bentuk pengetahuan murni namun juga diharapkan relevan untuk tujuan praktis (problem solving), bahan kebijakan nasional dan juga sebagai instrumen emansipasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia di masa mendatang. Pemuda merupakan elemen yang penting dan krusial bagi keberlanjutan sebuah bangsa. Namun di sisi yang lain, pemuda juga menjadi subjek yang relatif termarginalkan sebagai dampak dari infiltrasi neoliberalisme, ketidakpedulian pemerintah dan kesenjangan sosial yang semakin tajam termasuk sebagai akibat dari ketidakadilan global. Dengan kata lain, perlu dilakukan kajian mendalam, strategis dan sistematis untuk memahami lebih jauh mengenai ragam kehidupan pemuda di Indonesia. Dalam artikel ini penulis bertujuan menawarkan ide-ide mengenai agenda teoretis dan praktis dalam pengembangan kajian kepemudaan Indonesia ke depan. Secara rinci, agenda teoretis yang diusulkan meliputi: sintesa antara perspektif transisi dengan perspektif budaya, pengarusutamaan konsep kelas sosial dan kesenjangan sosial dan pengembangan studi kepemudaan berperspektif Indonesia.

Sedangkan agenda praktis yang ditawarkan antara lain: pengarusutamaan riset-ri-

set kepemudaan dan disseminasi pengetahuan kepemudaan secara merata. Argumen dalam ide-ide ini dibangun berdasarkan refleksi kritis penulis, pengamatan empiris terhadap kehidupan pemuda Indonesia kontemporer serta studi pustaka kajian kepemudaan kontemporer yang relevan. Ide-ide penulis dan eksplorasi mendalam mengenai agenda teoretis dan praktis dijelaskan di bawah ini.

AGENDA TEORITIS

Sintesa Antara Perspektif Transisi dengan Perspektif Budaya

Dalam kajian kepemudaan telah terbentuk semacam dikotomi bahwa perspektif transisi dan perspektif budaya adalah dua hal yang terpisah, namun sebenarnya keduanya adalah dua sisi yang berbeda dalam satu koin uang yang sama. Dalam tradisi sosiologi, dikotomi antara keduanya dapat dilacak dari perdebatan tanpa akhir antara struktur-agensi, struktural- kultural serta subjektif-objektif. Garis batas perbedaan antara kedua perspektif tersebut pada prosesnya berujung pada atmosfer yang kontra produktif dalam produksi pengetahuan dikarenakan kurangnya dialog antara kedua kubu tersebut.

Dalam perspektif transisi, aspek objektif seringkali mendapatkan porsi lebih karena fokus utamanya pada pengaruh sui generis institusi sosial dalam menentukan proses transisi pemuda secara linear terutama dari keluarga, pendidikan dan kerja. Perspektif ini menjadi dominan dalam tradisi studi kepemudaan di Inggris karena keterkaitannya dengan kepentingan para pembuat kebijakan terutama dalam memastikan kesuksesan transisi pemuda dari pendidikan ke dunia kerja, hal ini secara makro terkait dengan konteks industrialisasi yang semakin massif,

kebijakan *welfare state system* (France, 2007) serta transisi menuju rezim neoliberal. Implikasi lebih lanjut adalah pada metode penelitian, para penganut perspektif ini cenderung menggunakan metode kuantitatif bercorak komparatif dan preferensi pada riset-riset longitudinal. Disisi yang lain, perspektif budaya menitikberatkan pada aspek subjektif dan preferensi pada topik-topik yang dekat dengan kehidupan kaum muda seperti gaya hidup, konsumsi dan juga subkultur. Dampaknya kemudian pada penggunaan metode kualitatif terutama etnografi sebagai pilihan utama dan kecenderungan fokus penelitian dalam skala kecil atau kasuistik (Furlong, Woodman, Wyn, 2011).

Dikotomi antara perspektif transisi dengan perspektif budaya tidak akan produktif dalam upaya untuk memahami seluk beluk kehidupan pemuda dalam konteks sosial yang berubah secara cepat. Gelombang besar modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan pemuda; beberapa teoritikus kontemporer menjelaskan perubahan konteks tersebut sebagai late modernity era (Giddens, 1991), risk society (Beck, 1992) ataupun liquid modernity (Bauman, 2000). Studi kepemudaan memerlukan alat analisa yang tajam, bercorak eklektik dan mampu menjelaskan konteks sosial yang sedang berubah secara cepat (Woodman and Threadgold, 2011) sekaligus aspek subjektif dari pemuda sebagai agensi yang mengalami perubahan tersebut. Dengan kata lain, diperlukan perspektif yang mampu beyond the false binary antara perspektif transisi dengan budaya, salah satunya adalah dengan mainstreaming perspektif generasi dalam kajian kepemudaan. Perspektif generasi menawarkan alat analisa

untuk memahami pemuda dalam konteks perubahan sosial sekaligus mengakomodasi aspek subjektif pemuda (Wyn and Woodman 2006; Andres and Wyn 2010). Akomodasi terhadap aspek objektif (perubahan sosial) dan subjektif (pemaknaan) menjadi jembatan untuk mendamaikan antara perspektif transisi dengan perspektif budaya (Furlong, Woodman, Wyn, 2011). Dalam aspek metode, baik metode kuantitatif maupun kualitatif dapat dipdukan secara eklektik dengan tujuan utama yaitu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemuda dalam konteks sosial yang berubah.

Pengarusutamaan Konsep Kelas Sosial Dan Kesenjangan Sosial

Kelas sosial dan kesenjangan sosial merupakan konsep yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam agenda teoritis kajian kepemudaan di Indonesia. Fakta objektif dalam diskursus pengetahuan khususnya ilmu sosial di Indonesia, konsep kelas sosial cenderung dimarginalkan terutama sejak beralihnya kekuasaan pada rezim otoritarian orde baru (Rossa, Ratih dan Farid, 2004). Kelas sosial diasosiasikan sebagai konsep politis yang dekat dengan kaum kiri; dan dianggap mempunyai sifat subversif terhadap kestabilan sistem yang dibangun oleh rezim orde baru. Diskursus yang dibangun pada waktu itu mencoba merepresentasikan bahwa pembangunan dan modernisasi mutlak membawa manfaat terutama aspek ekonomi pada semua lapisan kelas sosial. Yang terjadi justru sebaliknya, pembangunan dan modernisasi yang berjaln erat dengan kepentingan kapitalisme justru membawa dampak pada kesenjangan sosial yang semakin lebar. Pengetahuan yang diproduksi pada prosesnya hanya didominasi oleh kepentingan untuk mele-

gitimasi program pembangunan dari rezim. Dengan kata lain merujuk pada pendapat Habermas (1971)), produksi pengetahuan hanya melayani technical interest (kepentingan teknis) untuk mengontrol dan mengarahkan masyarakat sebagai objek pembangunan sekaligus mempertahankan dominasi status quo. Produksi pengetahuan menjadi *lack of emancipatory interest*, atau keberpihakan kepada kaum-kaum marginal. Dalam konteks Indonesia, produksi pengetahuan pada masa perlawanan terhadap hegemoni kolonial, konsep kelas sosial sebenarnya mempunyai peran sentral. Salah satu founding fathers Indonesia Soekarno dalam karya-nya Indonesia Menggugat (1930) dan Di Bawah Bendera Revolusi (1963) secara imperatif mengusulkan mengenai pentingnya memperhatikan aspek kelas sosial dan kesenjangan sosial dalam memahami kondisi masyarakat Indonesia. Legasi para founding fathers tidak seharusnya dilupakan dan dianggap sebagai 'kebenaran mutlak' namun akan lebih bermanfaat jika dikontekstualisasikan dengan kondisi kontemporer.

Dalam konteks Indonesia yang sedang berubah terutama dalam hegemoni neoliberalisme, konsep kelas dan kesenjangan sosial sangat penting untuk dimunculkan kembali dalam produksi pengetahuan khususnya kajian kepemudaan (Furlong and Cartmel, 2007). Kaum muda dalam era neoliberalisme merupakan kaum marginal yang baru atau oleh Standing (2011) disebut sebagai the new precariat. Kebijakan ekonomi berdasarkan ideologi neoliberal dalam skala global cenderung tidak membawa keuntungan bagi kaum muda; hal ini terlihat misalnya dalam aspek pendidikan maupun ketenagakerjaan. Pendidikan yang seharusnya men-

jadi hak publik bergeser menjadi komoditas; diskriminasi berdasarkan kelas sosial menjadi lebih eksplisit karena logikanya sekarang pendidikan hanya diperuntukkan bagi kaum muda dari keluarga yang berduit. Pendidikan seharusnya menjadi salah satu manifestasi akumulasi cultural capital (Bourdieu, 1998) baik bagi kaum muda dari kelas sosial bawah untuk melakukan mobilitas sosial ke atas (upward class mobility) maupun sebagai investasi untuk mempertahankan posisi sosial bagi kaum muda dari kelas sosial menengah dan atas. Selain dalam aspek pendidikan, kebijakan neoliberal juga memarginalisasi pemuda terutama dalam aspek ketenagakerjaan. Sistem kontrak, eksploitasi upah, tidak adanya jaminan kesehatan serta outsourcing menjadi penghalang bagi kaum muda untuk mewujudkan aspirasi dan impiannya di masa depan; yang terjadi justru kaum muda akan selalu dihadapkan pada kondisi ketidakamanan dan ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupannya.

Konsep kelas dan kesenjangan sosial akan menjadi alat analisa yang tajam dalam memahami kondisi pemuda Indonesia kontemporer sebagai the new precariat yang harus berhadapan dengan hegemoni neoliberalisme. Dengan kepekaan akan diskriminasi dan marginalisasi terhadap pemuda dari kelas sosial tertentu maka akan membantu menentukan prioritas target kaum muda yang perlu diberdayakan; intervensi pemberdayaan dapat melalui kebijakan, pemberdayaan pada tataran akar rumput maupun produksi pengetahuan kritis. Secara spesifik, pengarusutamaan konsep kelas dan kesenjangan sosial juga akan menciptakan diversifikasi subjek studi pemuda. Selama ini fokus utama lebih dititikberatkan pada pemu-

da dari kelas menengah dan perkotaan, dengan kepekaan akan kelas sosial maka akan membuka peluang studi-studi mengenai pemuda yang tergolong dalam underclass youth (McDonald and Marsh, 2005), pemuda marginal dari pedesaan, pemuda dari daerah yang dikonstruksikan sebagai “daerah tertinggal” maupun pemuda yang hidup di perbatasan terluar dari wilayah Indonesia.

Pengembangan Kajian kepemudaan Berperspektif Indonesia

Pengembangan kajian kepemudaan dengan perspektif Indonesia merupakan agenda strategis yang penting diinisiasi sejak awal proses mainstreaming wacana kepemudaan. Sebagai bidang kajian yang relatif baru, peminjaman teori maupun perspektif dari negara metropole tidak dapat dihindari, namun hal ini tidak seharusnya membuat studi kepemudaan di Indonesia terjebak pada kebergantungan akademis di masa depan (Alatas, 2010). Kenyataan objektif dalam produksi pengetahuan secara global adalah adanya kesenjangan sekaligus relasi kuasa yang tidak seimbang antara metropole dengan periphery (Connell, 2007); kesenjangan tersebut direproduksi sejak masa kolonial dimana metropole mendapatkan legitimasi sebagai pusat pembentukan teori sedangkan periphery hanya dijadikan sebagai penyuplai data dan tempat uji coba teori (Samuel and Sutopo, 2013). Lebih lanjut hal ini juga berpengaruh pada ketidakadilan dalam pembagian kerja dimana intelektual dari metropole diakui sebagai teoritikus sedangkan intelektual periphery hanyalah sebagai buruh pengrajin data. Kesadaran akan relasi kuasa yang tidak seimbang ini perlu dipahami dalam proses pengembangan studi kepemudaan di Indonesia. Dengan semangat *look-*

ing back creating the future, pengembangan kajian kepemudaan di Indonesia seharusnya mampu belajar dari sejarah sosio-logi di Indonesia dimana pada awal orde baru, tanpa kesadaran kritis telah terjadi import pengetahuan dalam skala besar yang mengadopsi model sosiologi Amerika. Sampai sekarang bahkan sosiologi di Indonesia masih setia sebagai pengimpor dan konsumen dengan watak omnivora terhadap berbagai trend teori baru dari metropole. Dalam pengembangan kajian kepemudaan di Indonesia seharusnya ke depan hal ini tidak perlu terulang.

Langkah awal dalam pengembangan kajian kepemudaan berperspektif Indonesia adalah dengan mengkontekstualisasikan secara kritis berbagai macam teori dari metropole saat digunakan sebagai alat analisa berbagai fenomena kepemudaan di Indonesia. Spirit kontekstualisasi secara kritis merupakan langkah awal yang penting karena dengan sikap tersebut produksi pengetahuan menjadi lebih berwarna, lebih membumi dan tidak “memperkosakan” fenomena kepemudaan di Indonesia atas nama keuniversalan teori dari metropole. Ketidakepekaan akan konteks hanya akan meneguhkan watak otoritarian dari teori-teori metropole serta lebih lanjut kecenderungan ini akan mereproduksi apa yang dijelaskan oleh Connell (2007) sebagai *reading from the centre, gesture of exclusion* dan *grand erasure*. Dialog antara intelektual peminat studi kepemudaan dari Global North dengan Global South mutlak diperlukan sebagai upaya menerapkan imperatif bahwa *youth sociology must cross cultures* (Nilan, 2011).

Langkah selanjutnya adalah secara perlahan mengakumulasi pengetahuan berdasar-

kan studi-studi kepemudaan di Indonesia dan berani melakukan konstruksi teoritis sebagai cikal bakal teori kepemudaan Indonesia. Strategi politik pengetahuan ini penting sebagai salah satu upaya untuk melawan fenomena ketergantungan yang di jelaskan oleh Houtondji (1997) sebagai *extraversion (being oriented to external sources of authority)*. Dengan keberanian untuk menawarkan teori kepemudaan Indonesia maka diharapkan ke depan akan muncul gelombang baru yang saya namakan sebagai the emergence of southern thinkers. Produksi pengetahuan yang bervariasi akan menghasilkan *plurality of voices* (Connell, 2007) dan hal ini merupakan simptom yang sehat, membebaskan serta memberdayakan dalam mewujudkan kajian kepemudaan yang lebih demokratis di masa depan.

AGENDA PRAKTIS

Pengarusutamaan Riset-riset Kepemudaan

Konstruksi pengetahuan selalu terkait dengan konteks sosio-historis serta kekuasaan yang menaunginya; dalam *scope* makro tidak dapat dinafikkan bahwa proses pengembangan studi kepemudaan di Indonesia yang sedang dilakukan sekarang berada dalam kondisi perubahan sosial yang begitu cepat. Kutub kekuatan geopolitik dalam skala global juga mulai mengalami perubahan, terutama memasuki apa yang dinamakan sebagai abad Asia/the Asian Century (Mahbubani, 2008). Riset-riset kepemudaan di Indonesia harus dengan taktis merespon perubahan tersebut apabila ingin berpartisipasi terutama sebagai produsen dalam abad Asia. Sebagai perbandingan, kelompok *Australian youth sociologist* dengan cepat dan taktis merespon salah satu kebijakan pemerintah Australia da-

lam menghadapi Abad Asia yang tertuang dalam White Paper. Dengan mempertimbangkan konteks perubahan tersebut, riset-riset strategis kepemudaan ke depan harus memprioritaskan bagaimana memfasilitasi berbagai aspek kehidupan generasi muda dalam menghadapi dan mengambil manfaat pada abad Asia. Dengan memfasilitasi bukan berarti memperlakukan pemuda sebagai objek namun sebagaimana diusulkan dalam buku Pemuda Pasca Orba (Azca et.al 2011), unsur agensi pemuda perlu mendapatkan prioritas; dengan kata lain memberikan ruang yang seimbang antara pemuda sebagai agensi dan konteks sosial yang sedang berubah. Di bawah ini dijelaskan isu-isu kepemudaan yang relevan untuk mendapat prioritas dalam pengembangan kajian kepemudaan ke depan.

Transisi Pemuda dari Pendidikan Menuju Dunia Kerja

Salah satu isu kepemudaan yang perlu mendapat perhatian lebih adalah transisi pemuda dari dunia pendidikan menuju dunia kerja. Isu ini sebenarnya telah menjadi isu klasik yang belum pernah terpecahkan dari rezim ke rezim namun dalam konteks perubahan sosial sekarang ini, isu akses pekerjaan menjadi semakin krusial. Riset-riset kepemudaan terkait transisi menuju dunia kerja perlu memfokuskan pada dua aspek: Pertama, riset prioritas untuk penguatan pemuda sebagai agensi kreatif (*youth as a creative agency*) dan Kedua, riset prioritas untuk penguatan kebijakan kepemudaan (*youth policy*).

Dalam kehidupan sehari-hari, potensi pemuda Indonesia sebagai agensi kreatif nyata terlihat dalam berbagai sektor ekonomi kreatif. Mereka secara aktif mencoba meniasasi kurangnya lapangan pekerjaan formal

yang disediakan oleh Negara maupun lembaga swasta yang lain; manifestasinya dapat terlihat dalam dua aspek yaitu ekonomi kreatif yang digerakkan oleh *ordinary youth* (Woodman, 2013) dan *spectacular youth* (Hodkinson, 2012). Pemuda dari kelompok *ordinary youth* berstrategi mengembangkan ekonomi kreatif terutama yang terkait dengan *everyday life aspect* dari berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan pemuda dari kelompok *spectacular youth* mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan gaya hidup maupun subkultur pemuda dari kelas sosial tertentu. Wujudnya dapat terlihat dari produksi musik, fashion, film, seni berlandaskan spirit Do It Yourself (DIY). Mereka secara aktif membangun *networks capital* (Urry, 2007), mengkonversi modal budaya (Bourdieu, 1998) dengan modal ekonomi sebagai upaya kreatif dalam menghadapi transisi. Riset kepemudaan ke depan perlu diarahkan pada upaya memahami beragam strategi kreatif yang dilakukan oleh kedua kelompok pemuda ini termasuk mapping (pemetaan) ulang potensi ekonomi kreatif yang berbasis kaum muda.

Pemahaman akan beragam strategi kreatif pemuda sekaligus data yang komprehensif mengenai berbagai sektor ekonomi kreatif pemuda dari hasil riset kemudian digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan kebijakan kepemudaan (*youth policy*) yang diprioritaskan untuk mendorong dan memfasilitasi potensi kreatif tersebut. Bukan justru menghambat ataupun bahkan mengklaim keberhasilan sebagaimana yang dilakukan pemerintah selama ini. Dengan kata lain, kebijakan kepemudaan yang dihasilkan nantinya juga akan mengakomodir suara-suara yang berbeda dari kaum muda sebagai agensi;

hal ini penting bagi kedua belah pihak baik untuk keberhasilan kebijakan dan juga kebermanfaatannya bagi kaum muda itu sendiri. Dari sini mutual linkage antara riset, pemuda sebagai agensi dan kebijakan kepemudaan akan terbangun lebih baik dan produktif.

Selain riset-riset yang memfasilitasi kaum muda yang bergerak di ekonomi kreatif, riset-riset kepemudaan mengenai kaum muda yang lebih tertarik bekerja di sektor formal juga perlu dikembangkan. Arah riset ini ke depan adalah bagaimana proses zigzag journeys pemuda dalam mencari pekerjaan di sektor formal termasuk faktor pendukung dan penghambat baik struktural maupun kultural dalam proses transisi tersebut. Hal ini terkait dengan kebijakan neoliberal sekarang yang mensepakati outsourcing, eksploitasi serta ketiadaan jaminan masa depan yang cenderung membuat pemuda selalu berada dalam kondisi ketidakamanan dan ketidakpastian. Riset kepemudaan mengenai transisi menuju dunia kerja yang dihasilkan diharapkan mampu mendesak Negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan masa depan baik berupa jaminan pekerjaan, kesehatan dan kecelakaan kerja serta tunjangan hari tua bagi pemuda sebagai warga negara Indonesia.

Akses Pemerataan Pendidikan Bagi Pemuda

Pemerataan akses pendidikan merupakan isu krusial dalam agenda riset kepemudaan; pendidikan baik formal maupun informal merupakan bentuk *institutional cultural capital* (Bourdieu and Wacquant, 1992) bagi pemuda yang dapat digunakan sebagai salah satu modal untuk memperbaiki kualitas hidup, meraih impian di masa depan serta melakukan *upward class mobility* da-

dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Akses terhadap pendidikan bagi pemuda selain membantu mereka mengakumulasi *cultural capital*, juga secara tidak langsung memfasilitasi mereka untuk mengakumulasi *social capital*; kedua bentuk *capital* ini menjadi investasi yang berguna untuk dikonversi di masa depan.

Dalam konteks Indonesia, akses pendidikan bagi pemuda belum sepenuhnya merata baik dilihat dari aspek kelas sosial maupun ruang (*space*). Tingkat partisipasi pendidikan pemuda dari kelas bawah cenderung lebih rendah daripada kelas menengah dan atas, selain itu tingkat partisipasi pendidikan pemuda perkotaan juga lebih tinggi dari pedesaan. Kesenjangan yang lain misalnya tingkat pendidikan pemuda di Jawa sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pendidikan pemuda dari perbatasan ataupun daerah yang dikonstruksikan sebagai “tertinggal”. Hal ini ditambah lagi dengan komodifikasi pendidikan yang semakin masif sekarang ini membuat kesenjangan akses pendidikan menjadi lebih lebar. Studi yang dilakukan oleh Sutopo dan Azca (2013) menunjukkan bahwa pemuda dari kelas bawah di D.I Yogyakarta harus mengubur impian mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena ketidakmampuan secara ekonomi. Riset-riset kepemudaan ke depan perlu memprioritaskan mengenai akses pemerataan pendidikan bagi pemuda Indonesia sekaligus memformulasikannya dalam bentuk kebijakan kepemudaan.

Diversifikasi Pemuda Sebagai Subjek Kajian

Konstruksi pemuda sebagai subjek dalam studi kepemudaan cenderung bias pada indi-

kator biologis terutama umur (*cohort*) serta secara sosiologis bias pada pemuda dari latar belakang perkotaan (*urban youth*). Dalam konteks Indonesia misalnya, UU Kepemudaan No 40 tahun 2009 bahkan hanya secara umum mendefinisikan pemuda dari segi usia (16-30 tahun); kecenderungan ini akan berakibat pada generalisasi baik dalam proses produksi pengetahuan maupun kebijakan kepemudaan. Riset-riset kepemudaan ke depan harus melakukan diversifikasi pemuda sebagai subjek kajian. Basis diversifikasi dari konsep pemuda ini dapat berdasarkan kelas sosial, ruang (*space*) maupun subkultur yang berkaitan erat dengan pemuda. Terkait dengan kelas sosial, riset-riset kepemudaan ke depan perlu memberikan prioritas pada pemuda dari kelas sosial bawah atau marjinal. Terkait dengan ruang (*space*), perlu dikembangkan riset mengenai pemuda pedesaan, pemuda pesisir serta pemuda perbatasan. Selain itu terkait dengan ruang, pemuda dari daerah yang distigma sebagai daerah “hitam” juga perlu diberikan tempat. Lebih lanjut, terkait dengan subkultur, riset-riset kepemudaan ke depan juga perlu memberikan prioritas kajian pada pemuda yang bergabung dalam kelompok subkultur, misalnya terkait dengan musik (*jazz, metal, indie, funk, under-ground*), terkait dengan seni (*performance art, teater, seni tradisional*) maupun subkultur kreatif yang lain. Diversifikasi pemuda sebagai subjek kajian akan membantu memahami keberagaman kelompok pemuda yang ada di Indonesia, menghindari bias dalam produksi pengetahuan dan formulasi kebijakan sekaligus menjadi alternatif dalam memunculkan suara-suara pemuda sebagai agensi.

Pemuda pedesaan, pemerataan akses lahan dan kedaulatan pangan

Terkait dengan poin diversifikasi pemuda sebagai subjek kajian diatas, salah satu topik riset yang juga perlu mendapat perhatian ke depan adalah mengenai pemuda pedesaan, disposisi lahan dan masa depan pertanian di Indonesia. Agenda ini mengembangkan tawaran dari Ben White (2011) dalam pidato valedictory-nya “Who Will Own the Country Side? Dispossession, Rural Youth and the Future of Farming”. Dalam refleksinya, White (2011) menjelaskan bahwa lebih dari 70% angka kemiskinan global terbesar terdapat di pedesaan terutama yang terlibat dalam usaha pertanian. Di sisi yang lain, usaha pertanian dalam skala kecil masih menjadi salah satu penyumbang lapangan pekerjaan terbesar; termasuk sebagai salah satu pemasok bahan pangan di dunia. Namun dalam kenyataannya, sektor ini harus mengalami apa yang dinamakan sebagai “the battle for the future of agriculture”; terkait dengan partisipasi kaum muda, disposisi lahan dan konflik antar generasi. Kaum muda kontemporer cenderung lebih berorientasi untuk bermigrasi ke wilayah perkotaan; ada banyak hal sebagai penyebab antara lain: pengaruh pola pendidikan yang berorientasi pada modernisasi, kurangnya skill-skill yang relevan dengan dunia pertanian dan kondisi desa yang stagnan. Secara struktural, kondisi ini semakin kompleks karena telah terjadi disposisi lahan pertanian secara besar-besaran ke tangan investor baik lokal, nasional maupun global. Dengan kata lain, pemerataan kepemilikan lahan merupakan isu yang penting untuk mendapatkan perhatian ke depan.

Dengan mempertimbangkan usulan dari White (2011), agenda riset kepemudaan ke

depan perlu mengembangkan riset-riset empiris di berbagai daerah di Indonesia terkait dengan faktor-faktor (struktural, kultural maupun generational) yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemuda pedesaan untuk bekerja di sektor pertanian. Riset empiris ini penting untuk mengetahui beragam variasi-variasi penyebab di berbagai daerah. Selain itu di Indonesia tingkat pengangguran pemuda dan kemiskinan terbesar juga masih terpusat di pedesaan, oleh karena itu riset empiris ini relevan untuk dikembangkan sebagai basis bagi formulasi kebijakan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran pemuda pedesaan, mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan mendesak terwujudnya reformasi agraria terutama pemerataan akses lahan bagi pemuda pedesaan. Peningkatan partisipasi pemuda pedesaan di sektor pertanian dan pemerataan akses lahan dapat menjadi entry point bagi terwujudnya agenda kedaulatan pangan di Indonesia.

Riset Longitudinal Antar Generasi Sebagai Basis Data Kebijakan Kepemudaan

Dalam buku Pemuda Pasca Orba (Azca et al, 2011) sempat dilontarkan rekomendasi untuk melakukan riset-riset longitudinal sebagai basis data bagi pengembangan kebijakan kepemudaan; ke depan agenda riset longitudinal ini perlu diteruskan sebagai upaya untuk mengakumulasi data yang lebih komprehensif. Sebagai langkah awal, apabila berbagai pihak berkomitmen untuk mendukung riset longitudinal terutama mitra kerjasama antara universitas, pemerintah dan pihak swasta maka inisiatif tersebut dapat diawali dengan meneliti pemuda dari usia 16 tahun (berdasarkan UU Kepemudaan No 40 tahun 2009) untuk jangka waktu 5-10 tahun

mendatang. Secara bertahap, proses serta hasil riset dikumpulkan dan dievaluasi; jika pada prosesnya berdampak positif maka durasi riset longitudinal dapat diperpanjang menjadi 25 tahun. Tema besar dalam riset ini dapat memfokuskan pada perbedaan kualitas hidup pemuda antar generasi serta mengeksplorasi bagaimana generasi muda menegosiasikan antara sisi growing up dengan being young dalam menjalani transisi menuju kedewasaan. Riset longitudinal ini penting tidak hanya sebagai basis data untuk pembuatan kebijakan kepemudaan namun juga sebagai upaya untuk memahami perubahan antar generasi. Sebagai contoh, Andres and Wyn (2010) melakukan riset longitudinal mengenai pemuda Australia dan Canada yang lahir pasca tahun 1970an serta melakukan perbandingan antara keduanya. Hasil studi ini menemukan banyak fakta menarik mengenai perubahan dalam berbagai aspek pemuda antar generasi; hasil temuan mereka berkontribusi besar terhadap pembuatan kebijakan kepemudaan sekaligus pengembangan studi kepemudaan di kedua negara tersebut. Update data kepemudaan melalui riset logitudinal akan sangat produktif bagi formulasi kebijakan kepemudaan di Indonesia yang peka terhadap perubahan sosial baik dalam skala lokal, nasional maupun global; perwujudan agenda ini memerlukan komitmen, kerjasama dan itikad baik dari berbagai pihak yang peduli terhadap permasalahan pemuda di Indonesia.

Diseminasi pengetahuan kepemudaan secara merata

Dalam pembentukan dan mainstreaming wacana studi kepemudaan di Indonesia, diseminasi dan distribusi pengetahuan merupakan hal yang penting. Pengetahuan selain dapat

menjadi alat komunikasi untuk membentuk pemahaman juga dapat menjadi alat orientasi (means of orientation), tentu saja penekanan orientation disini penulis usulkan lebih kepada potensi pembebasan bagi pemuda sebagai subjek. Apabila dianalogikan seperti ranah pertarungan (*field of struggle*) maka produksi pengetahuan kepemudaan berbasis universitas sekarang ini sedang berkompetisi dengan wacana kepemudaan yang sarat kepentingan pasar dan juga sarat kepentingan Negara. Produksi pengetahuan kepemudaan berbasis universitas ke depan seharusnya lebih memfasilitasi suara-suara pemuda sebagai agensi; hal ini sebagai perimbangan di tengah gempuran wacana kepemudaan berbasis kepentingan pasar dan kepentingan Negara. Dengan kata lain, produksi pengetahuan kepemudaan lebih memainkan peran sebagai pembela kepentingan publik dan kemanusiaan sebagaimana imperatif dari Burawoy:

“If the standpoint of economics is the market and its expansion, and the standpoint of political science is the state and the guarantee of political stability then the standpoint of sociology is civil society and defends of the social, defends the interest of humanity” (Burawoy 2005; p. 287).

Ruang diseminasi hasil riset kepemudaan dapat berupa jurnal dan buku. Keduanya diharapkan dapat menjadi ruang yang “bebas dan demokratis” dalam memunculkan berbagai wacana kepemudaan di Indonesia. Target awal diseminasi pengetahuan kepemudaan difokuskan pada scope lokal dan nasional; prioritas ini penting sebagai upaya membangun wacana kepemudaan yang relevan dengan konteks Indonesia sekaligus penguatan kapasitas internal. Dengan berorientasi ke dalam (internal), bukan berarti kemudian produksi pengetahuan kepemuda-

an di Indonesia tidak berintegrasi dengan wacana global; justru wacana kepemudaan yang berbasis lokal dan nasional inilah yang nantinya menjadi daya tawar saat berpartisipasi dalam produksi pengetahuan kepemudaan di tataran global. Strategi ini merupakan manifestasi jalan tengah dalam upaya mengatasi kecenderungan produksi pengetahuan yang dijelaskan Hanafi (2011) sebagai *publish globally and perish locally vs publish locally and perish globally*.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, penulis ingin menegaskan bahwa kajian kepemudaan merupakan ranah yang luas, kompleks sekaligus dinamis. Di sisi yang lain, relasi dialektis antara perkembangan pemuda itu sendiri dengan perubahan sosial baik dalam skala lokal, nasional dan global juga melaju semakin pesat. Ide-ide yang diusulkan dalam artikel ini merupakan hasil pilihan dan refleksi penulis berdasarkan skala prioritas diantara sekian banyak isu teoritis maupun praktis yang berkembang dalam berbagai mazhab kajian kepemudaan di tingkat global. Prioritas pilihan agenda didasarkan pada konteks sosio-historis, budaya, politik maupun relasi global dimana kajian kepemudaan Indonesia akan dikembangkan ke depan. Perjuangan untuk mengembangkan kajian kepemudaan di Indonesia masih panjang namun langkah pertama melalui produksi pengetahuan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ideal di masa depan. Ide-ide yang diusulkan dalam artikel ini merupakan manifestasi dari sebuah titik awal perjuangan sekaligus penulis ingin menitipkan kunci kepada generasi muda supaya mereka dapat membuka lebih banyak pintu-pintu alternatif yang membebaskan di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alatas, Syed Farid. (2010) *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia: Tanggapan terhadap Eurosentrisme*. Jakarta: Mizan Publika.
- Azca, M Najib, Subando dan Lalu Wildan (Eds). (2011). *Pemuda Pasca Orba: Potret Kontemporer Pemuda Indonesia*. Yogyakarta: YouSure Fisipol UGM.
- Bauman, Zygmunt. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity
- Beck, Ulrich. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage Publication Ltd
- Bourdieu, Pierre. (1998). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University.
- Bourdieu, Pierre & Wacquant L. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Cambridge: Polity.
- Burawoy, Michael. (2005). *For a Public Sociology*. British Journal of Sociology, 56 (2): 259-294.
- Connell, Raewyn. (2007). *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science*. Australia: Allen and Unwin.
- France, Alan. (2007). *Understanding Youth in Late Modernity*. New York: Open University Press
- Furlong, Andy & Fred Cartmel (2007). *Young People and Social Change: New Perspectives*. USA: Open University.
- Furlong, Andy, Woodman Dan and Wyn Johanna. (2011). *Changing Times Perspectives: Reconciling Transition and Cultural Perspectives on Youth and Young Adulthood*. Journal of Sociology, 47 (4): 355-370.
- Giddens, Anthony. (1991). *The Consequen-*

- ces of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Guy, Standing. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. USA: Bloomsbury Academic.
- Habermas, Juergen. (1971). *Knowledge and Human Interest*. Boston: Beacon Press.
- Hanafi, Sari. (2011). *University Systems in the Arab East: Publish Globally and Perish Locally vs Perish Locally and Publish Globally*. *Current Sociology*, 59 (3): 291-309.
- Hodkinson, Paul. (2012). *Beyond Spectacular Specific in the Study of Youth (sub) cultures*. *Journal of Youth Studies*, 15 (5): 557-572.
- Houtondji, Paulin J (Ed). (1997). *Endogenous Knowledge: Research Trails*. Senegal: Codesria.
- Lesley, Andres & Wyn, Johanna. (2010). *Making of a Generation: The Children of 1970s in Adulthood*. Canada: University of Toronto.
- Macdonald, Robert and Jane Marsh. (2005). *Disconnected Youth? Growing Up in Britain's Poor Neighbourhoods*. English: Macmillan.
- Mahbubani, Kishore. (2008). *The New Asian Hemisphere*. USA: Public Affairs.
- Nilan, Pam. (2011). *Youth Sociology Must Cross Cultures*. *Youth Studies Australia*, 30 (3): 20-26.
- Roosa, John, Ayu Ratih & Hilmar Farid. (2004.) *Tahun yang Tak Pernah Berakhir*. Jakarta: ELSAM.
- Samuel, Hanneman & Oki Rahadianto Sutopo. (2013). *The Many Faces of Indonesia: Knowledge Production and Power Relations*. *Asian Social Science*, 9 (13), 289-298.
- Soekarno. (1963). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Soekarno. (1930). *Indonesia Menggugat*. Jakarta: Indayu Press.
- Sutopo, Oki Rahadianto & M. Najib Azca. (2013). *Transisi Pemuda Yogyakarta Menuju Dunia Kerja: Narasi dan Perspektif dari Selatan*. *Jurnal Universitas Paramadina*, 10 (2), 698-719
- UU Kepemudaan No 40 Tahun 2009. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
- White, Ben. (2011). *Who Will Own the Countryside? Dispossession, Rural Youth and the Future of Farming*. The Hague: International Institute of Social Studies.
- Woodman, Dan. (2013). *Researching Ordinary Young People in a Changing World: The Sociology of Generations and the Missing Middle in Youth Research*. *Sociological Research Online*, 18 (1) No 7, 1-12.
- Woodman, Dan & Threadgold, Steven. (2011). *The Future of Youth Sociology: Institutional, Theoretical and Methodological Challenges*. *Youth Studies Australia*, 30 (3): 8-12.
- Wyn, Johanna & Woodman, Dan. (2006). *Generation, Youth and Social Change in Australia*. *Journal of Youth Studies*, 9 (5), 495-514.